
INTEGRASI BISNIS INKLUSIF DAN COMMUNITY-BASED TOURISM DI LOMBOK TENGAH

M. Surya Maulana Firdaus¹, Nur Widiyanto², Moch. Nur Syamsu³,
Agung Yuliyanto Nugroho⁴, Suswanto⁵

^{1,2,3,5}Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta

⁴Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Yogyakarta

e-mail: maulanafsurya@gmail.com

Abstract: *Community-Based Tourism/CBT is a tourism approach that places the community as the main actor. In order for economic and social benefits to be more evenly distributed, an implementation model with an inclusive business approach is needed in its management. This study aims to analyze the implementation of inclusive business in the development of CBT in Sukarara and Bilebante Tourism Villages, Central Lombok. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that Sukarara Village has succeeded in implementing the principles of inclusive business through strengthening local weaving businesses, training, access to capital, and partnerships with the tourism sector. In contrast, Bilebante Village still faces obstacles in institutional capacity and market access even though it has the potential for local herbal businesses. The conclusion of this study shows that the implementation of inclusive business can strengthen the development of CBT fairly and sustainably if supported by cross-sector collaboration, increasing community capacity, and policies that favor locality. This study contributes to strengthening the theory of inclusive business in the tourism sector and offers applicable policy recommendations for the development of tourist villages.*

Keywords: *Inclusive Business, Community-Based Tourism, Tourism Village, Community Empowerment*

Abstrak: Community-Based Tourism/CBT merupakan pendekatan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Agar manfaat ekonomi dan sosial lebih merata, diperlukan model penerapan dengan pendekatan bisnis inklusif dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bisnis inklusif dalam pengembangan CBT di Desa Wisata Sukarara dan Bilebante, Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukarara telah berhasil menerapkan prinsip bisnis inklusif melalui penguatan usaha tenun lokal, pelatihan, akses modal, serta kemitraan dengan sektor pariwisata. Sebaliknya, Desa Bilebante masih menghadapi kendala dalam kapasitas kelembagaan dan akses pasar meskipun memiliki potensi usaha herbal lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bisnis inklusif dapat memperkuat pengembangan CBT secara adil dan berkelanjutan jika didukung oleh kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, dan kebijakan yang berpihak pada lokalitas. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori bisnis inklusif di sektor pariwisata serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk pengembangan desa wisata.

Kata kunci: *Bisnis Inklusif, Community-Based Tourism, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan *community-based tourism* (CBT). CBT didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam komunitas yang dimiliki, dijalankan, dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat lokal (Widiyanto, dkk, 2023). Pendekatan ini tidak hanya melindungi tradisi serta sumber daya sosiokultural, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber pendapatan tetap (ASEAN Community-Based Tourism Standard, 2016). Di Kabupaten Lombok Tengah, dua desa yaitu Sukarara dan Bilebante telah menunjukkan potensi dan komitmen dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan, meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya.

Desa Sukarara dikenal sebagai desa adat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Sasak, khususnya dalam siklus hidup dan tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun (Pranata Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014). Kerajinan tenun di desa ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya, tetapi juga merupakan sumber utama penghidupan masyarakat (Sari, 2024). Tangke, dkk. (2018) menunjukkan bahwa kerajinan tradisional memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan lokal dan menjaga keberlanjutan budaya. Hidayah, dkk. (2023) juga menegaskan bahwa keberadaan tenun menjadi instrumen pelestarian identitas lokal di tengah ancaman modernisasi. Namun, sebelum penerapan resmi konsep bisnis inklusif pada Mei 2023, para pengrajin di desa ini masih bergantung pada sistem distribusi tradisional yang cenderung eksploitatif dan tidak efisien (Kustijana, 2023). Ketergantungan terhadap agen penampung serta minimnya keterampilan

dalam pemasaran dan manajemen menghambat daya saing produk tenun di pasar yang lebih luas (Manu, 2021), terlebih dengan kurangnya akses pelatihan dan dukungan promosi (Hidayah, 2023). Sebagai respons terhadap kendala tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan meluncurkan program pemberdayaan melalui BUMDes, skema kredit usaha rakyat (KUR), serta pelatihan teknis yang difasilitasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Inisiatif ini bertujuan untuk menghubungkan pengrajin dengan pasar yang lebih luas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata (Oktiana, 2020). Intervensi semacam ini juga didukung secara regulatif melalui PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha di desa wisata.

Sementara itu, Desa Bilebante yang ditetapkan sebagai desa wisata melalui Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2018 dan Perdes No. 03 Tahun 2016 mengandalkan potensi ramuan herbal dan wisata kebugaran sebagai daya tarik utama. Inisiatif kerja sama dengan Bank Indonesia pada Mei 2024 mendukung pengembangan UMKM lokal melalui produksi ramuan tradisional dan promosi wisata kesehatan (Damayanti, 2024). Namun, desa ini juga menghadapi permasalahan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya pengelolaan destinasi secara mandiri (Frasawi, 2018).

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai studi terdahulu telah menekankan bahwa model bisnis inklusif dalam sektor pariwisata mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal (Liu, 2020; Bhatt, 2024; Gounder, 2022). Prinsip-prinsip seperti penciptaan nilai

bersama, keterlibatan lokal, dan pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa wisata yang berkeadilan. Hal ini memperkuat relevansi intervensi kebijakan dan program di tingkat lokal, seperti yang terlihat dalam pengembangan CBT di Sukarara dan Bilebante.

Namun demikian, belum banyak studi yang mengkaji secara komparatif penerapan model bisnis inklusif pada dua desa wisata dengan tingkat kesiapan kelembagaan dan potensi ekonomi yang berbeda. Masih terdapat kekosongan dalam memahami bagaimana pendekatan inklusif tersebut dapat diadaptasi secara kontekstual untuk mendorong pengembangan CBT yang efektif. Celah penelitian ini membuka ruang penting untuk menelaah dinamika, tantangan, dan peluang dari integrasi pendekatan bisnis inklusif dalam memperkuat pariwisata berbasis komunitas.

Dengan membandingkan Sukarara sebagai desa percontohan dan Bilebante sebagai desa yang masih dalam tahap penguatan kapasitas, studi ini menyajikan pendekatan kritis terhadap efektivitas model bisnis inklusif dalam membangun desa wisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan agenda SDGs nomor 1 dan 10, serta Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 yang mendorong pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengembangan pariwisata. Integrasi masyarakat dalam rantai nilai tidak hanya memfasilitasi distribusi manfaat secara merata, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pelaku ekonomi aktif dalam transformasi desa wisata.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi model bisnis inklusif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Sukarara dan Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Data dikumpulkan

melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor kunci seperti masyarakat, pelaku usaha, BUMDes (Karya Sejati dan Bersama Sahara), kepala desa, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan informan (Given, 2008), sementara data sekunder mencakup laporan resmi, statistik, serta literatur buku, jurnal dan laporan Teknik analisis data menggunakan model triangulasi dari Miles dan Huberman (1994), meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel, serta verifikasi untuk penarikan kesimpulan (Creswell, 2018; Moleong, 2017). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, panduan observasi, dan checklist dokumentasi, dengan tahapan penelitian dimulai dari perumusan masalah, studi literatur, hingga analisis tematik hasil temuan untuk merumuskan strategi pengembangan CBT yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengelolaan Community-Based Tourism yang Inklusif di Kawasan Desa Wisata Sukarara dan Bilebante, Lombok Tengah

1. Keterlibatan (Engagement)

Praktik keterlibatan (engagement) dalam pengelolaan CBT yang inklusif di Desa Sukarara dan Bilebante tampak melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan pengembangan wisata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Di Sukarara, pelaku tenun, tokoh adat, dan kelompok perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum desa dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), sementara di Bilebante, warga diberdayakan melalui peran sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, serta pengurus koperasi desa. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat rasa

- kepemilikan atas program wisata, tetapi juga mendorong inklusi sosial dan keberlanjutan karena masyarakat merasa memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan potensi lokal mereka.
2. Akses (Access)
Prinsip akses dalam pengelolaan CBT di Desa Sukarara dan Bilebante tercermin dari terbukanya peluang partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi lokal, tanpa diskriminasi gender dan usia, melalui peran seperti pengrajin, pemandu wisata, dan penyedia homestay atau kuliner. Meski inklusivitas ini menunjukkan kemajuan, hambatan seperti keterbatasan literasi digital, akses pelatihan, serta kesenjangan aset antara kelompok inti dan pinggiran masih menghambat pemerataan manfaat. Infrastruktur fisik lebih memadai di Bilebante, sedangkan Sukarara menghadapi tantangan aksesibilitas. Meski demikian, adanya pelatihan lokal dan program berbasis desa mengindikasikan upaya kolektif untuk memperluas akses sosial-ekonomi secara berkelanjutan.
 3. Pemberdayaan (Empowerment)
Pemberdayaan dalam pengelolaan CBT di Sukarara dan Bilebante dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Di Bilebante, pelibatan aktif perempuan dan pemuda dalam pelatihan kuliner sehat dan pengelolaan homestay memperkuat posisi sosial mereka. Sementara di Sukarara, perempuan tenun diberdayakan melalui revitalisasi nilai budaya dan inovasi desain produk. Namun, belum semua kelompok memperoleh akses yang setara terhadap pelatihan dan sumber daya. Pemberdayaan yang berbasis komunitas juga masih dibatasi oleh keterbatasan modal sosial dan ketergantungan pada tokoh sentral dalam pengambilan keputusan.
 4. Penciptaan Keuntungan Bersama (Creating Shared Value)
Praktik penciptaan nilai bersama terwujud melalui sinergi antara pelaku usaha lokal, pemerintah desa, dan komunitas. Produk wisata tidak hanya diarahkan untuk menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, seperti melalui klaster tenun di Sukarara dan pertanian organik di Bilebante. Nilai tambah ekonomi dibagikan melalui sistem koperasi, bagi hasil homestay, dan rotasi jadwal pemandu. Namun, distribusi manfaat masih belum sepenuhnya merata, terutama di kalangan warga yang belum terlibat dalam ekosistem pariwisata. Pengembangan rantai nilai lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan pasar yang lebih luas dan masih memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat.
 5. Keberlanjutan (Sustainability)
Aspek keberlanjutan di kedua desa tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Bilebante, praktik pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya air menjadi bagian dari paket wisata edukatif. Di Sukarara, keberlanjutan dijaga melalui pelestarian tradisi tenun dan regenerasi penenun muda. Namun, tantangan keberlanjutan muncul dari fluktuasi kunjungan wisatawan, ketergantungan pada sumber daya terbatas, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan dalam menjaga daya dukung lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, keberlanjutan CBT di kedua desa memerlukan strategi adaptif, perencanaan jangka panjang, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih erat.

Peran Pemerintah Maupun Pemangku Kepentingan Dalam Mendukung Transisi Desa Sukarara dan Bilebante, Lombok Tengah Menuju Model Bisnis Inklusif yang Berkelanjutan

1. Desa Sukarara
Pemerintah berperan aktif dalam membentuk ekosistem yang mendukung pengembangan bisnis inklusif di Desa Sukarara melalui program pelatihan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan lokal. Pemerintah daerah dan dinas pariwisata menyediakan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal tenun tradisional. Selain itu, dukungan dalam bentuk promosi destinasi melalui berbagai kanal juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha desa.

Pemangku kepentingan non-pemerintah seperti LSM, akademisi, dan sektor swasta turut berkontribusi melalui kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya, keterlibatan universitas dalam pelatihan kewirausahaan dan digital marketing meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

Kunci keberhasilan transisi menuju model bisnis inklusif di Desa Sukarara terletak pada sinergi antar aktor serta upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kepemilikan usaha. Kolaborasi multipihak ini memperkuat prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus mendorong keadilan dalam distribusi manfaat pariwisata.

2. Desa Bilebante
Pemerintah di Desa Bilebante berperan sebagai fasilitator dan inisiator dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan dengan pendekatan inklusif. Melalui kebijakan desa dan dukungan dari pemerintah kabupaten, dilakukan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Infrastruktur penunjang wisata, seperti jalur sepeda dan homestay, dibangun untuk mendukung pengalaman

wisata berbasis alam dan kesehatan.

Pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, kelompok tani, serta pengelola desa wisata memainkan peran strategis dalam pengembangan model bisnis yang mengikutsertakan berbagai segmen masyarakat. Praktik kolaboratif seperti pengelolaan paket wisata berbasis komunitas dan sistem bagi hasil memperkuat prinsip akses dan pemberdayaan. Keterlibatan pemuda desa sebagai pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif juga memperkaya dinamika bisnis inklusif.

Desa Bilebante menunjukkan keberhasilan dalam menyelaraskan antara kebutuhan pasar dan nilai-nilai lokal melalui dukungan lintas sektor. Keberlanjutan dicapai dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan kohesi sosial. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai mitra strategis masyarakat memungkinkan terjadinya transformasi menuju desa wisata yang inklusif dan tangguh.

Peluang dan Tantangan dalam Mengimplementasikan Model Bisnis Inklusif untuk Pengembangan Community-Based Tourism di Kawasan Desa Wisata Sukarara dan Bilebante, Lombok Tengah

1. Peluang

Desa Sukarara memiliki peluang besar melalui peran strategis BUMDes “Karya Sejati” yang menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. BUMDes ini menyediakan bahan baku tenun, akses permodalan, dan memasarkan produk lokal, sehingga mendukung keterlibatan pelaku usaha kecil, khususnya perempuan pengrajin. Fungsi ini memperkuat konsep penciptaan nilai bersama dan kemandirian ekonomi desa.

Di sisi lain, keberadaan warisan budaya berupa tenun tradisional Sasak menjadi nilai ekonomi dan

daya tarik utama pariwisata. Hal ini memungkinkan diferensiasi produk dan potensi penguatan branding desa di pasar nasional maupun internasional. Keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan nilai budaya ini membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang otentik dan berkelanjutan.

Desa Bilebante juga memiliki peluang signifikan dengan mengangkat potensi herbal tradisional, pertanian organik, serta aktivitas wellness tourism seperti pijat dan jamu. Keterlibatan pemuda dalam digitalisasi promosi dan pelatihan hospitality menjadi motor inovasi lokal. Pengembangan paket wisata berbasis aktivitas sehari-hari membuka jalan untuk integrasi pengetahuan lokal dengan tren wisata modern.

2. Tantangan

Di Desa Sukarara, tantangan utama adalah ketimpangan dalam rantai nilai ekonomi tenun. Pengrajin sebagai produsen utama belum memperoleh proporsi keuntungan yang sepadan karena dominasi pengepul dan lemahnya akses pasar langsung. Hal ini memperkuat ketergantungan dan menurunkan posisi tawar masyarakat lokal.

Masalah lainnya adalah rendahnya literasi keuangan dan semangat kewirausahaan. Banyak masyarakat masih menganggap bantuan modal dari BUMDes sebagai hibah, bukan pinjaman produktif. Akibatnya, terjadi kredit macet yang mengganggu sirkulasi dana dan memperlemah keberlanjutan sistem pendanaan ekonomi lokal.

Desa Bilebante menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pelatihan sistematis, serta terbatasnya infrastruktur. Selain itu, inklusi sosial belum merata karena masih adanya dominasi elite lokal dalam pengambilan keputusan.

Ketimpangan partisipasi dan resistensi terhadap perubahan menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi model bisnis inklusif dalam pengembangan community-based tourism (CBT) di Desa Sukarara dan Bilebante menunjukkan dinamika yang berbeda. Desa Sukarara telah berhasil mengintegrasikan prinsip bisnis inklusif melalui pemberdayaan usaha tenun dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam rantai nilai pariwisata lokal. Sementara itu, Desa Bilebante masih menghadapi tantangan dalam kapasitas kelembagaan dan akses pasar, meskipun memiliki potensi produk herbal yang dapat dikembangkan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan CBT yang inklusif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas lokal, serta dukungan regulasi dan pendampingan dari pemerintah maupun sektor swasta.

Temuan ini memberikan implikasi terhadap penguatan integrasi prinsip-prinsip bisnis inklusif dalam konteks pariwisata berbasis komunitas di tingkat desa, khususnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Selain itu memberikan langkah praktis terkait penguatan kelembagaan, distribusi akses yang lebih merata terhadap pelatihan dan sumber daya, serta penciptaan sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga studi lebih lanjut direkomendasikan dengan pendekatan kuantitatif atau perbandingan lintas wilayah. Luaran dari tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha desa, serta akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan

pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhatt, K., Seabra, C., Kumar, J., Ashutosh, K., & Kumar Kabia, S. (2024). Tourism-Led Inclusive Growth in Emerging and Developing Economies: A Systematic Literature Review. *SAGE Open*, 14(2), 21582440241252516.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Damayanti, R., & Handayani, S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 153-165.
- Frasawi, E. S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata ambengan kecamatan sukasada. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3).
- Given, L. M. (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Sage Publications.
- Gounder, R. (2022). Tourism-led and economic-driven nexus in Mauritius: Spillovers and inclusive development policies in the case of an African nation. *Tourism Economics*, 28(4), 1040-1058.
- Hausler, N. (2005). Community-based tourism. *Tourism Forum International at the Reisevavillon*. Hanover 6 Februari 2005.
- Khalid, S., Ahmad, M., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su11226248>.
- Kristiyana, N., & Rapini, T. (2017). Dinamika Usaha Pengrajin Reog Ponorogo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 2. No. 1* (2017), 2(1), 149-164.
- Kustijana, D. H., Setiawan, A. I., Dewi, A. S., Haryanto, B., & Purwanto, D. (2023). Penerapan pemasaran digital pada pengrajin berbahan pelepah alami Desa Murtigading Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 321-327.
- Liu, Y. (2020). "Social Innovation and Inclusive Business Model for the Bottom of the Pyramid: A Case Study of Organic Tourism Ecosystem in Thailand."
- Manu, A. K. A., Selan, R. N., Tualaka, T. M., & Dhae, Y. K. (2021). Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Bagi Pengrajin Tenun Kampung Alor. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 438-442.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja.
- Oktiana, P. (2020). Dampak Pengembangan Desa Wisata Sukarara Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal: Studi di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata. <https://www.kemendparekraf.go.id>
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- Pranata Daftar Inventarisasi Komunitas Adat NTB. 2014. Nama Komunitas Adat yang Ada di Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. <https://pranataadatntb.wordpress.com/2016/07/25/first-blog-post/#more-6>.
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589-609.

- Scheyvens, R., & Hughes, E. (2021). Can tourism help to “end poverty in all its forms everywhere”? The challenge of tourism addressing SDG1. In *Activating critical thinking to advance the sustainable development goals in tourism systems* (pp. 215-233). Routledge.
- Stoian, D., Donovan, J., Fisk, J., and Muldoon, M.F. (2012) ‘Value Chain Development for Rural Poverty Reduction: A Reality Check and A Warning’, *Enterprise Development and Microfinance* 23 (1). <https://doi.org/10.3362/1755-1986.2012.006>.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.09>.
- Tangke, P., Randa, F., & Siang, J. T. (2024). PEMBERDAYAAN POTENSI PENGRAJIN TRADISIONAL DALAM RANGKA MELESTARIKAN BUDAYA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENGRAJIN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(2), 62-71.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 1, 41.
- Widiyanto, N., Widyaningsih, R., & Suhartapa. (2023). Contesting identity through the market: Tourism and indigenous movement in Kasepuhan Ciptagelar, West Java. *IBDA`, Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 21(1), 37–56. <https://doi.org/10.24090/ibda.v21i1.7781>.